ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN KOTA PALEMBANG PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

DIAH MAHARANI
07011381520074

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN KOTA PALEMBANG PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

DIAH MAHARANI
07011381520074

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2019

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II

Sofyan Effendy, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN KOTA PALEMBANG PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 11 Juli 2019
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001
Ketua

Sofyan Effendy, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
Anggota

Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002
Anggota

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002
Anggota

Palembang, Juli 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"JADILAH DIRIMU YANG TERBAIK, DEMI ORANG YANG KAMU CINTAI."
(MERRY RIANA)

"BE YOUR SELF."
(DIAH MAHARANI)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Nenekku tercinta Siti Ningrum**
- **Papaku Eep dan Mamaku Suharni**
- **Saudara-saudaraku**
- **Sahabat dan teman seperjuanganku**
- **Dosen dan Pegawai Fisip Unsri**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan".

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat kurikulum pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Sebagai seorang manusia yang memiliki kemampuan terbatas, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat pertolongan dari Allah SWT dan dukungan dari keluarga, kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku maka kendala tersebut dapat diatasi. Skripsi ini disusun atas bantuan dari beberapa banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang memberikan kontribusi yang sangat berharga kepada penulis. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Nenekku tercinta Siti Ningrum yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan kasih sayangnya selama ini.
2. Papaku Eep dan Mamaku Suharni serta kedua kakakku Rajendra Eka Prasetya, A. Md dan Riki Mahendra, S.T serta kedua adikku Wahyu Hidayat dan Nia Auliya yang telah mendo'akan dan mendukungku.
3. Bunda, Bikcik, Bik Linda, Putri, Pak Aden, Bik Ida, Pak Jaya yang selalu membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendy, S. IP., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, M.PA selaku Wakil Dekan III FISIP Unsri yang telah memberikan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan saran dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri yang telah memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Sofyan Effendy, S. IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memperlancar dalam proses akademik dan penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Dwi Mirani, S. IP., M.Si selaku Dosen FISIP Unsri yang selalu memberikan bantuan, dorongan serta semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini serta memberikan penulis banyak ilmu dan pengalaman tentang penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi.

11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FISIP Unsri yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku kuliah.
12. Seluruh staf dan karyawan FISIP Unsri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkhusus kepada Bidang Pajak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis, memberikan ilmu dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan kelengkapan data-data guna menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Pihak UPTB Palembang I dan UPTB Palembang II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan kelengkapan data-data guna menyelesaikan skripsi ini.
15. Para Wajib Pajak Pajak Air Permukaan UPTB Palembang II yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan kelengkapan data-data guna menyelesaikan skripsi ini.
16. Kakakku di HIMARA Kak Aulia Utami Putri, S. IP., M.Si Ilmu Administrasi Publik 2012 dan Kak Widya Lestari, S. IP Ilmu Administrasi Publik 2014 yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
17. Sahabatku Ria Maryani, Reski Bela Angelya, Nanda Monalisa, Nyimas Erdiana Putri Permata Sari, Kurniawati Indah Pratiwi dan adikku Nyimas Sarah Anisa yang telah mengajarkan banyak hal, khusunya tentang berjuang di tanah rantau dan setiap hari selalu saling membantu dan mendukung.
18. Teman-temanku Ulin, Peggy, Mimi, Deriana teman satu kelompok Kuliah Kerja Administrasi (KKA) Angkatan X Ilmu Administrasi Publik Kampus Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Rekan-rekan seperjuanganku Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2015 Kampus Palembang yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
20. Seluruh teman-teman satu angkatan Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2015 yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.
21. Rekan-rekan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMARA) FISIP Unsri.
22. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan dan keikhlasan Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Palembang, Juli 2019
Penulis,

Diah Maharani

ABSTRACT

This study aims to describe and uncover the reasons for not achieving the contribution of the Surface Water Tax of Palembang City in 2017. The concept used is the concept proposed by Mardiasmo and then measuring the Interval Ratio Contribution category and measuring the growth rate of Surface Water Tax based on the Tax Growth Rate criteria by Halim in 2007. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used were interviews, documentation, and library studies. The results of this study found that the contribution of the Surface Water Tax of the City of Palembang to the Regional Revenue Agency of South Sumatra Province in 2017 was classified as a very low contribution ratio category. This contribution is influenced by several factors, namely inhibiting factors and supporting factors. The addition of new companies is as big as PDAM and PT. PUSRI as a taxpayer is needed because of the very lacking contribution of the Surface Water Tax of the City of Palembang. The Regional Revenue Agency of South Sumatra Province and UPTB Palembang I and Palembang II are expected to continue to improve socialization so that there is no longer limited knowledge of taxpayers regarding the obligation to pay Surface Water Taxes.

Keywords : Contributions, Receipts, Taxes, Water, Surface.

Advisor I	***Advisor II***
Dr. Lili Erina, M.Si	**Sofyan Effendy, S.IP., M.Si**
NIP. 196612301992032001	**NIP. 197705122003121003**

Palembang, July 2019
Chairman of The Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University

Zaitanal Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkap penyebab tidak tercapainya kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang tahun 2017. Konsep yang digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh Mardiasmo kemudian dilakukan pengukuran kategori Interval Rasio Kontribusi serta mengukur laju pertumbuhan Pajak Air Permukaan didasarkan pada kriteria Laju Pertumbuhan Pajak oleh Halim tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 tergolong pada kategori rasio kontribusi sangat kurang. Kontribusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Penambahan perusahaan baru sebesar PDAM dan PT. PUSRI sebagai wajib pajak diperlukan karena terkait kontribusi Pajak Air Permukaan Kota Palembang yang sangat kurang. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB Palembang I serta Palembang II diharapkan terus meningkatkan sosialisasi agar tidak ada lagi keterbatasan pengetahuan wajib pajak terkait kewajiban membayar Pajak Air Permukaan.

Kata Kunci : Kontribusi, Penerimaan, Pajak, Air, Permukaan.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Lili Erina, M.Si	**Sofyan Effendy, S.IP., M.Si**
NIP. 196612301992032001	**NIP. 197705122003121003**

Palembang, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL. ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI. ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI. ..... **iii**
MOTO DAN PERSEMBAHAN. ..... **iv**
KATA PENGANTAR. ..... **v**
***ABSTRACT*.** ..... **vii**
ABSTRAK. ..... **viii**
DAFTAR ISI. ..... **ix**
DAFTAR TABEL. ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR. ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN. ..... **xiii**
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN. ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN. **1**
A. Latar Belakang. 1
B. Rumusan Masalah. 7
C. Tujuan Penelitian. 7
D. Manfaat Penelitian. 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. **9**
A. Landasan Teori. 9
   1. Pajak. 9
   2. Pajak Daerah. 21
   3. Pajak Air Permukan. 24
   4. Analisis Kontribusi Pajak Air Permukaan Kota Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 25
   5. Faktor yang Mempengaruhi (Penurunan/Peningkatan) Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang. 27
B. Penelitian Terdahulu. 28
C. Kerangka Berfikir. 29

BAB III METODE PENELITIAN. **31**
A. Jenis Penelitian. 31
B. Definisi Konsep. 31
C. Fokus Penelitian. 32
D. Jenis dan Sumber Data. 33
E. Informan Penelitian. 34
F. Teknik Pengumpulan Data. 34
G. Teknik Analisis Data. 35
H. Teknik Keabsahan Data. 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. **38**
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian. 38
   1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 38
   2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 39
   3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 39
   4. Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera

Selatan. 41
5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 42
6. Daftar dan Lokasi Wajib Pajak Pajak Air Permukaan. 56
B. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... 57
1. Analisis Kontribusi dalam Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan... 58
a. Analisis Target Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang..... 58
b. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang..... 61
c. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang... 65
2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi (Penurunan/Peningkatan) Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 75
a. Analisis Faktor Penghambat yang Dihadapi serta Solusi yang Ditempuh... 76
b. Analisis Faktor Pendukung Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan… 84

BAB V PENUTUP. 89
A. Kesimpulan..... 89
B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA. 93
LAMPIRAN. 96

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. 3
2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 4
3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 4
4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 5
5. Data Jumlah Wajib Pajak Pajak Air Permukaan. 6
6. Kategori Interval Rasio. 26
7. Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak. 27
8. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kontribusi Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 29
9. Fokus Penelitian. 32
10. Daftar dan Lokasi Wajib Pajak Pajak Air Permukaan UPTB Palembang I dan UPTB Palembang II Tahun 2017. 56
11. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017. 62
12. Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017. 63
13. Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2015. 66
14. Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2016. 68
15. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) UPTB Palembang I Tahun 2017. ... 70
16. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) UPTB Palembang II Tahun 2017... 71
17. Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017. 72
18. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2015-2017. 74
19. Pengukuran Laju Pertumbuhan Pajak Air Permukaan. 75

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kerangka Pemikiraan Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 29
2. Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Tugas Pembimbing Usulan Penelitian
3. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
4. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing I
5. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Dosen Pembimbing II
6. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji I
7. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji II
8. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji III
9. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Penguji IV
10. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
12. Surat Balasan Izin Pengambilan Data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
13. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I
14. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II
15. Lembar Revisi Ujian Skripsi Penguji I
16. Lembar Revisi Ujian Skripsi Penguji II
17. Lembar Revisi Ujian Skripsi Penguji III
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
19. Biodata Diri Penulis

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Bapenda	: Badan Pendapatan Daerah
Fungsi *Budgetair*	: Sumber keuangan negara
Fungsi *Regularend*	: Pengatur
Hambatan dari Fiskus	: Hambatan dari Aparatur Pajak atau Pejabat Pajak
Jasa Imbal (Kontraprestasi)	: Timbal balik secara langsung dan individual
PAP	: Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan	: Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi
Pajak Pejualan atas Barang Mewah	: Seringkali disebut Pajak Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor.
Pemikul Pajak	: Orang yang menurut Undang-undang harus dibebani pajak
Public *Investment*	: Investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yang sifatnya resmi.
Tax Holiday	: Pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun selama periode tertentu.
Teori Asas Gaya Beli	: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk

pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Triangulasi : Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Upaya dalam mencapai pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia. Usaha untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Upaya

Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan salah satunya adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Sejak tahun 1948 telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Setiap anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang, proses pemungutan pajak dan retribusi daerah pada akhirnya menunjukkan akan memberikan beban kepada masyarakat. Masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Permasalahan yang sering kali terjadi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran orang pribadi atau badan dalam hal membayar pajak daerah, padahal dalam pelaksanaan pengelolaan pajak, tak luput dari peran aktif masyarakat dalam membayarkan kewajibannya akan pajak untuk kemakmuran daerah dan negara ini karena pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang luas dan nyata bagi pembangunan daerah dan sekaligus dapat mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1, menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siahaan (2005:7) dalam bukunya yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

> "Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan."

Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menerapkan Undang-undang tersebut, telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	2.911.883.386.175,00	2.835.440.186.799,80	97,37
2	Retribusi Daerah	14.542.756.000,00	15.442.784.364,00	106,19
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	79.561.220.650,00	55.702.074.349,60	70,01
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	159.373.633.400,00	125.048.578.790,55	78,46
Total		3.165.360.996.225,00	3.031.633.624.303,95	95,78

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Tabel 1 di atas data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 yang paling banyak berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Penelitian ini hanya akan membahas salah satu pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

yaitu Pajak Air Permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di Provinsi. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Pajak	Tahun 2015		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	777.486.400.742,00	788.639.973.747,00	101,43
	PKB R2 dan R4	775.275.400.742,00	785.782.252.496,00	101,36
	PKB Alat Berat	2.000.000.000,00	2.597.725.268,00	129,89
	PKB Atas Air (PKAA)	211.000.000,00	259.995.983,00	123,22
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	710.570.000.000,00	599.151.806.746,00	84,32
	BBN R2 DAN R4	710.000.000.000,00	596.462.294.191,00	84,01
	BBN Alat Berat	500.000.000,00	2.637.433.155,00	527,49
	BBN Atas Air (BBN-KKA)	70.000.000,00	52.079.400,00	74,40
3.	Pajak Air Permukaan (PAP)	5.284.838.000,00	6.898.796.013,55	130,54
4.	PBB-KB	640.000.000.000,00	610.577.042.978,40	95,40
5.	Pajak Rokok	377.443.298.942,00	319.597.513.677,00	84,67
Jumlah		2.510.784.537.684,00	2.324.865.133.161,95	92,60

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Data Tabel 2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah dari jenis Pajak Air Permukaan tahun 2015 target dan realisasinya paling rendah dibanding jenis pajak daerah yang lainnya, yaitu dengan target hanya sebesar Rp.5.284.838.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.6.898.796.013,55 dengan capaian persentasenya sebesar 130,54 persen.

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Pajak	Tahun 2016		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.036.420.637.518,00	850.081.635.310,00	82,02
	PKB R2 dan R4	1.033.013.683.981,00	847.081.975.441,00	82,00
	PKB Alat Berat	3.195.953.537,00	2.774.033.332,00	86,80
	PKB Atas Air (PKAA)	211.000.000,00	225.626.537,00	106,93

Lanjutan Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	741.820.000.000,00	528.600.881.474,00	71,26
	BBN R2 DAN R4	740.000.000.000,00	526.209.192.157,00	71,11
	BBN Alat Berat	1.750.000.000,00	2.340.144.917,00	133,72
	BBN Atas Air (BBN-KKA)	70.000.000,00	51.544.400,00	73,63
3.	Pajak Air Permukaan (PAP)	5.991.981.692,00	6.695.115.133,96	111,73
4.	PBB-KB	640.000.000.000,00	513.205.513.586,00	80,19
5.	Pajak Rokok	487.528.096.368,00	480.376.919.229,00	98,53
	Jumlah	2.911.760.715.578,00	2.378.960.064.732,96	81,70

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Tabel 3 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah dari jenis Pajak Air Permukaan tahun 2016 target dan realisasinya paling rendah dibanding jenis pajak daerah yang lainnya, yaitu dengan target hanya sebesar Rp.5.991.981.692,00 dan realisasinya sebesar Rp.6.695.115.133,96 dengan capaian persentasenya sebesar 111,73 persen.

Tabel 4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Pajak	Tahun 2017		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	859.985.858.854,00	877.960.831.995,00	102,09
	PKB R2 dan R4	850.000.000.000,00	873.456.322.575,00	102,76
	PKB Alat Berat	9.710.858.854,00	4.237.725.858,00	43,64
	PKB Atas Air (PKAA)	275.000.000,00	266.783.562,00	97,01
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	861.782.735.321,00	808.325.809.350,00	93,80
	BBN R2 DAN R4	853.462.735.321,00	802.473.526.615,00	94,03
	BBN Alat Berat	8.250.000.000,00	5.788.147.385,00	70,16
	BBN Atas Air (BBN-KKA)	70.000.000,00	64.135.350,00	91,62
3.	Pajak Air Permukaan (PAP)	15.250.000.000,00	10.845.979.912,40	71,12
4.	PBB-KB	697.000.000.000,00	670.559.294.854,40	96,21
5.	Pajak Rokok	477.864.792.000,00	467.748.270.688,00	97,88
Jumlah		2.911.883.386.175,00	2.835.440.186.799,80	97,37

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Data Tabel 4 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah dari jenis Pajak Air Permukaan tahun 2017 target dan realisasinya paling rendah dibanding jenis pajak daerah

yang lainnya, yaitu dengan target hanya sebesar Rp.15.250.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.10.845.979.912,40 dengan capaian persentasenya hanya sebesar 71,12 persen.

Data Tabel 2 dan Tabel 3 dapat dilihat untuk tahun 2015 dan tahun 2016 penerimaan pajak daerah untuk jenis Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai target, sedangkan Tabel 4 untuk tahun 2017 sendiri belum mencapai target yaitu hanya sebesar 71,12 persen.

Data Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 juga dapat dilihat perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah untuk jenis Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Target tertinggi ada pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.15.250.000.000,00 dengan realisasi penerimaan pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp.10.845.979.912,40 dengan persentase hanya mencapai 71,12 persen.

Tabel 5 Data Jumlah Wajib Pajak Pajak Air Permukaan

No	UPTB Kab/Kota	Jumlah Wajib Pajak/Perusahaan		
		2015	2016	2017
1	Palembang I	17	18	18
2	Palembang II	10	10	16
3	Musi Banyuasin (Muba) I	6	7	6
4	Musi Banyuasin (Muba) II	7	10	11
5	Banyuasin	22	28	33
6	Ogan Komering Ilir (OKI) I	6	9	10
7	Ogan Komering Ilir (OKI) II	2	3	3
8	Ogan Ilir	6	7	8
9	Ogan Komering Ulu (OKU)	9	11	10
10	Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS)	1	2	2
11	Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) I	1	1	2
12	Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) II	12	15	16
13	Muara Enim	27	28	33
14	Prabumulih	2	2	2
15	Lahat	14	16	20
16	Pagaralam	3	4	6
17	Musi Rawas (Mura)	2	2	3
18	Lubuk Linggau	1	1	1
19	Empat Lawang	6	6	7
20	Muratara	-	1	3
21	Pali	2	3	5
Jumlah		156	184	215

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018

Setiap komponen penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu komponen yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Pajak Air Permukaan khususnya untuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Palembang I dan Palembang II. Jumlah wajib pajak untuk UPTB Palembang I berjumlah 18 wajib pajak dan UPTB Palembang II berjumlah 16 wajib pajak. Jika dijumlahkan dari kedua UPTB untuk Kota Palembang maka berjumlah 34 wajib pajak yang merupakan paling banyak di antara UPTB yang lain.

Peneliti dalam penelitian ini akan melakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana kontribusi atau persentase sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah khususnya Pajak Air Permukaan untuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kota Palembang sebagai salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis tertarik mengambil judul penelitian berdasarkan permasalahan di atas, yaitu **"Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah mengapa Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang Tahun 2017 tidak tercapai ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap penyebab dari tidak tercapainya Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan Kota Palembang Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Administrasi Keuangan Publik, yaitu aspek penerimaan pajak daerah dari jenis Pajak Air Permukaan.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti di masa akan datang dan pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, Jhon. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed dan Ilmu Sosial Lainnya*. Terjemahan. Jakarta: Kencana.

Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.

Kesit, Bambang Prakoso. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Andi.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munir.et.al. 2004. *Perencanaan Anggaran.* Yogyakarta: UGM.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, P. Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sumber-sumber Lain:

Peraturan-peraturan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Presiden Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Presiden Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14. Gubernur Sumatera Selatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74. Gubernur Sumatera Selatan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B. Gubernur Sumatera Selatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.

Dokumen

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (Patda) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017.

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Selama 6 Tahun (Tahun 2013 s.d Tahun 2018) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Selama 7 Tahun (Tahun 2012 s.d Tahun 2018) Untuk Jenis Pajak Air Permukaan (PAP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Skripsi

Pasaribu, Vita Sari Handayani. 2017. *Analisis Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya: Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya.

Internet (Jurnal)

Gloria Kartika Waani, Intan. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, (Online), Vol. 4, No. 1, (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11769, diakses 09 November 2018).

Hasanudin. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. *Accountability*, (Online), Vol. 3, No. 1, (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/4941, diakses 24 November 2018).

Sari, Tri Mustika. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah). *Eprint*, (Online), (http://eprints.dinus.ac.id/8635/, diakses 24 November 2018).